

memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar, berpola hidup sehat.

d. Kurikulum yang lebih demokratis yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan kepen-

tingan daerah serta kemampuan dan motivasi belajar peserta didik dengan mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan kompetensi yang ditentukan.

Penutup

Kurikulum berbasis kompetensi sangat diharapkan dapat menghasilkan insan yang tidak sekedar unggul pada aspek kognitif saja tetapi juga pada aspek psikomotorik dan aspek afektif. Untuk itu peserta didik diharapkan memiliki kecakapan hidup yang memadai. PKH diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dalam mempermudah memperoleh lapangan kerja bagi lulusan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Peserta didik yang mendapat bekal secukupnya untuk secara mandiri diharapkan dapat menghadapi hidup yang semakin keras.

Daftar Bacaan

Direktorat PMU 2002. *Pengembangan Pelaksanaan Broad-Based Education, High-based Education, dan life Skills di SMU*. DikDasMen DikNas: Jakarta.

Indra Jati Sidi, 2002. *Konsep Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup*. Dirjen DikDasMen Diknas: Jakarta.

Kurniawan, *Pengembangan Kurikulum Berbasais Kompetensi Mata Pelajaran Geografi*, Dies natalis UNNES: Semarang, 2002

Santoso S. Hamijoyo, 2002. *Menjelajah ranah Keterampilan Hidup*. Seminar nasional lifeskills, Pascasarjana UNY: Yogyakarta.

Siskandar, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Dies Natalis UNNES : Semarang 2002

Tim Broadbased Education, 2002. *Life Skills Education*. Depdiknas: Jakarta.

Wardiman Djojonegoro, 2002. *Life Skills Dalam Perspektif Pendidikan Nasional di Era Global*. Seminar nasional lifeskills, Pascasarjana UNY: Yogyakarta.

P2KP SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh
Sukidjo

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi selalu diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang bersifat multi dimensi. Kemiskinan dapat berdimensi ekonomi, budaya dan struktural. Oleh sebab itu dalam menanggulangi kemiskinan hendaknya tidak semata-mata dipecahkan dari aspek ekonomi saja, melainkan menggunakan pendekatan yang komprehensif, dan bertumpu pada akar permasalahan penyebab terjadinya kemiskinan tersebut.

Banyak program Jaring pengaman Sosial yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan, misalnya program bantuan pangan, IDT, PDM-DKE, dan P2KP. Program P2KP dinilai lebih tepat untuk masyarakat dalam pengentasan kemiskinan karena sasarannya kelompok, dan bersifat komprehensif baik dengan cara pemberian dana bergulir, dana hibah untuk pelatihan dan dana hibah untuk pembangunan infrastruktur, diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan desentralisasi.

Perwujudan pemberdayaan bagi kelompok miskin terlihat pada pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok serta diterapkannya strategi tribina, yang dijabarkan ke dalam pengorganisasian kelompok masyarakat, pemberian bantuan dana untuk modal bergulir, pelatihan dan pembangunan infrastruktur serta kegiatan pendampingan yang berkelanjutan.

Kata kunci : JPS-P2KP, pemberdayaan, kemiskinan

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan tingkat kemakmuran warganegarannya setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan

pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur taraf hidup dan kemakmuran seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan per kapita

tinggi, dimana mereka dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya termasuk kategori makmur. Sebaliknya orang yang memiliki pendapatan per kapita rendah, hanya mampu mencukupi kebutuhan sekedar untuk mempertahankan hidupnya, mereka ini berada dalam kelompok miskin. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakberdayaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan merupakan masalah pokok pembangunan yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang harus segera diatasi, tidak dapat ditunda-tunda dan harus dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab meningkatnya kemiskinan akan memiliki dampak yang sangat luas dan rawan baik yang berkaitan dengan sosial budaya maupun kriminalitas. Kemiskinan dapat menyebabkan terlantarnya pendidikan anak, rendahnya produktivitas kerja, serta makin meningkatnya tindak kejahatan, pencurian, munculnya tidak asusila, pemerasan dan penipuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua negara sepakat untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun. Pertama

telah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan hasilnya cukup menggembirakan. Akan tetapi adanya krisis ekonomi mengakibatkan dampak yang sangat besar yakni jumlah penduduk miskin meningkat tajam sebagai akibat terjadinya pengangguran yang meluas. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 1996 memberikan hasil yang menggembirakan, karena mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi 6-7% dalam jangka panjang serta mampu menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam tahun 1990 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15% atau sebanyak 27 juta jiwa, turun menjadi 11% atau sebanyak 22 juta jiwa. Sementara itu pendapatan perkapita naik dari \$ 80 pada tahun 1969 naik menjadi \$ 1100 pada akhir taun 1996 (Gunawan Sumadiningrat : 1999 : 90). Namun demikian dengan adanya krisis ekonomi, banyak perusahaan besar dan lembaga perbankan mengalami kebangkrutan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk miskin. Menurut perkiraan BPS, jumlah pengangguran sampai dengan akhir tahun 1998 mencapai 13,4 juta jiwa, dalam tahun 1999 meningkat menjadi 18-20 juta jiwa dan pada akhir tahun 2002 diperkirakan telah mencapai 40 juta

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan tingkat kemakmuran warganegaraanya setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur taraf hidup dan kemakmuran seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan per kapita tinggi, dimana mereka dapat memenuhi sebagian besar kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya termasuk kategori makmur. Sebaliknya orang yang memiliki pendapatan per kapita rendah, hanya mampu mencukupi kebutuhan sekedar untuk mempertahankan hidupnya, mereka ini berada dalam kelompok miskin. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakberdayaan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan merupakan masalah pokok pembangunan yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang harus segera diatasi, tidak dapat ditunda-tunda dan harus dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab meningkatnya kemiskinan akan memiliki dampak yang sangat luas dan rawan baik yang berkaitan dengan sosial budaya

maupun kriminalitas. Kemiskinan dapat menyebabkan terlantarnya pendidikan anak, rendahnya produktivitas kerja, serta makin meningkatnya tindak kejahatan, pencurian, munculnya tidak asusila, pemerasan dan penipuan dan sebagainya. Oleh sebab itu, semua negara sepakat untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan yang dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun Pertama telah menjangkau seluruh pelosok tanah air dan hasilnya cukup menggembirakan. Akan tetapi adanya krisis ekonomi mengakibatkan dampak yang sangat besar yakni jumlah penduduk miskin meningkat tajam sebagai akibat terjadinya pengangguran yang meluas. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sampai dengan tahun 1996 memberikan hasil yang menggembirakan, karena mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi 6-7% dalam jangka panjang serta mampu menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam tahun 1990 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15% atau sebanyak 27 juta jiwa, turun menjadi 11% atau sebanyak 22 juta jiwa. Sementara itu pendapatan perkapita naik dari \$ 80 pada tahun 1969 naik menjadi \$ 1100 pada akhir taun 1996 (Gunawan Sumadiningrat :

1999 : 90). Namun demikian dengan adanya krisis ekonomi, banyak perusahaan besar dan lembaga perbankan mengalami kebangkrutan sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk miskin. Menurut perkiraan BPS, jumlah pengangguran sampai dengan akhir tahun 1998 mencapai 13,4 juta jiwa, dalam tahun 1999 meningkat menjadi 18-20 juta jiwa dan pada akhir tahun 2002 diperkirakan telah mencapai 40 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin membengkak menjadi 80 juta atau 40% dari jumlah penduduk (Gunawan Sumadiningrat : 1999 : 91-92) Menghadapi makin banyaknya jumlah penduduk miskin dan pengangguran tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang dikenal dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Secara umum tujuan JPS adalah : (1) menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat, serta kesempatan usaha, (2) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk menggerakkan kembali kegiatan perekonomian rakyat, (3) memelihara sistem pelayanan masyarakat dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Di Indonesia dikenal ada dua pengertian JPS yakni JPS 'klasik' dan JPS 'Plus'. JPS klasik program JPS yang memberikan bantuan pangan dan menciptakan lapangan kerja dengan padat karya, sedangkan JPS Plus merupakan JPS yang disempurnakan,

yakni pemberian bantuan yang dilanjutkan dengan kegiatan sosial ekonomi produktif yang telah dilaksanakan sejak penanggulangan kemiskinan dengan gerakan nasional program IDT (Gunawan Sumadiningrat, 1999 : 123). Dalam melaksanakan JPS plus, karena dalam melaksanakan bantuan disertai dengan program pendampingan sehingga masyarakat mampu mengenal potensi dan peluang yang akhirnya mampu untuk mandiri dalam berusaha dan program ini lebih dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat. Program ini secara rutin dievaluasi dan disempurnakan, dengan melibatkan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya serta unsur perguruan tinggi sehingga muncul model pembangunan partisipatif. Penyempurnaan program IDT dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan model pembangunan partisipatif yang dikembangkan dewasa ini antara lain Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Program IDT, PPK dan PDM-DKE merupakan JPS untuk desa-desa IDT, sedangkan P2KP merupakan program JPS dengan sasaran wilayah IDT di perkotaan. P2KP ini merupakan prakarsa baru dari Pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di perkotaan. P2KP ini dirancang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas dalam kerangka keberlanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kalurahan perkotaan. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan P2KP adalah pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan keterlibatan masyarakat serta memosisikannya sebagai subyek pembangunan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat khususnya kelompok miskin mampu menjawab akar permasalahan kemiskinan yang menimpa mereka sereka mampu melestarikan hasil-hasil yang dicapai melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pendekatan pemberdayaan ini selaras dengan hakekat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan pemberdayaan tersebut, P2KP tidak hanya sekedar untuk mengatasi kemiskinan akibat krisis ekonomi melainkan dapat mengatasi/menganggulangi kemiskinan

struktural serta mampu memberdayakan lembaga masyarakat guna memerangi dan mengurangi kemiskinan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan visi dan misi P2KP. Visi P2KP diarahkan agar masyarakat mampu membangun secara sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, misi P2KP adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan memberdayakan kemitraan sinergai antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya (Djoko Handoyo, 2001 : 16). Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya P2KP dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yang akan dicapai adalah terjadinya percepatan pengurangan kemiskinan serta peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam menangkal dan menanggulangi kemiskinan khususnya di perkotaan. Sedangkan tujuan khusus yang akan dicapai meliputi tiga hal, yakni : (1) terciptanya organisasi masyarakat yang representatif, tanggap dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan, (2) meningkatnya pelayanan kepada masyarakat miskin khususnya untuk mendapatkan dana

kehidupan yang lain. Dengan demikian kemiskinan dapat diartikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yakni adanya kekurangan materi dan non materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Ricky Iswar : 2000 : III -2).

Pada umumnya kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak. Apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Konsep kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif disebut juga kemiskinan struktural, yang menggambarkan perbandingan pembagian pendapatan antar kelompok dalam masyarakat. Kemiskinan relatif ini banyak digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan dalam pembagian pendapatan, apakah pembagian pendapatan tersebut timpang atau tidak. Dalam mengukur timpang tidaknya pembagian pendapatan suatu negara, Bank Dunia memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah, memperoleh kurang dari 12 %

pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan di negara tersebut termasuk sangat tinggi;

- b. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 - 17% pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan di negara tersebut termasuk sedang; dan
- c. Jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% pendapatan nasionalnya, maka ketimpangan pembagian pendapatan di negara tersebut rendah (Nurjaman, 2000 : 21; Tulus Tambunan, 1996 : 51; The Kian Wie, 1996 : 126).

Mengingat kemiskinan relatif ini membandingkan pendapatan antar kelompok maka dapat terjadi seseorang yang menurut ukuran kebutuhan pokok tidak miskin namun karena pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompoknya maka yang bersangkutan dikatakan miskin. Penduduk yang berada dalam kemiskinan relatif masih memiliki potensi untuk produktif, karena itu perlu diberikan motivasi melalui dunia usaha, misalnya dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan teknik maupun bantuan perijinan.

Sedangkan kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan dimana pendapatan yang dimilikinya

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jika pendapatan seseorang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya maka yang bersangkutan disebut berada dalam garis kemiskinan. Pendapatan minimum tersebut digunakan sebagai pembatas untuk menentukan miskin atau tidak miskin. Ada beberapa ukuran garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, berdasarkan kurs dollar tahun 1971 pedesaan sebesar \$50 dan \$75 untuk daerah perkotaan per kapita per tahun. Dalam tahun 2002, UNDP menetapkan garis kemiskinan yakni sebesar \$2 per kapita per hari. Sayogya menggunakan pendapatan ekuivalen beras, untuk desa sebanyak 240 kg dan untuk kota 360 kg per kapita per tahun. Sementara itu, BPS menggunakan ukuran pendapatan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan 2100 kalori per kapita per hari (Tulus Tambunan, 1996 : 51).

Ada beberapa pola atau jenis kemiskinan yang terjadi, antara lain sebagai berikut :

- a. Cultural poverty atau kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yakni masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya meskipun sudah ada usaha atau dorongan dari pihak luar.
- b. Persistent poverty merupakan kemiskinan turun temurun,

kemiskinan yang terjadi karena berada di daerah kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi;

- c. Cyclical poverty atau kemiskinan yang disebabkan oleh siklus perekonomian, misalnya terjadi keadaan resesi maupun depresi ;
- d. Seasonal poverty atau kemiskinan musiman merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh perubahan musim, misalnya pada musim tanam atau musim tidak panen banyak petani yang berada dalam kemiskinan.
- e. Accidental poverty atau kemiskinan akibat bencana alam.

Menurut Ricky Iswar (1997 : III-6), kemiskinan pada dasarnya kemiskinan memiliki tiga dimensi, yakni :

- a. Dimensi ekonomi atau material. Jenis kemiskinan ini paling jelas dan paling mudah diukur, yakni kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- b. Dimensi sosial dan budaya, dimana lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong sebagai budaya miskin. Jadi pada masyarakat miskin akan terbentuk budaya miskin, misalnya bersifat apatis, fatalistik, apolitis, ketidakberdayaan, berserah diri, dan menganggap bahwa kemiskinan yang terjadi merupakan takdir.

c. Dimensi struktural atau politik, yakni seseorang yang mengalami kemiskinan ekonomi akan mengalami kemiskinan struktural dan politik, karena sebagai orang miskin tidak memiliki sarana untuk dapat terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga mereka ini menduduki struktur sosial yang paling bawah

Dimensi Pemberdayaan P2KP dalam Menanggulangi Kemiskinan

Dibandingkan dengan Program Bantuan pangan, IDT, PDM-DKE, program P2KP memiliki keunggulan dalam memberdayakan kelompok miskin. Oleh sebab itu, diharapkan program P2KP akan lebih mampu dalam memberdayakan kelompok miskin, sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara optimal. Melalui P2KP, potensi yang dimiliki kelompok miskin ditingkatkan, diaktualisasikan dengan cara dilakukan pendampingan, bimbingan dan pembentukan jaringan kerja. Dimensi pemberdayaan P2KP dalam memberdayakan kelompok miskin, antara lain berupa :

1. Pendekatan strategi P2KP didasarkan pada pendekatan "pembangunan bertumpu pada kelompok " (*community based development approach*).

a. Pembentukan kelompok masyarakat dibangun atas dasar ikatan : kesamaan tujuan, kesamaan

kegiatan, kesamaan wilayah domisili yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas. Kelompok sasaran tersebut dikenal dengan istilah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tiap KSM dibentuk oleh anggota masyarakat khususnya kelompok miskin yang memiliki usaha ataupun kelompok yang siap berusaha dengan anggota antara 3 sampai dengan 15 orang. Pembinaan dan pendampingan pada KSM dimaksudkan agar dalam kelompok tersebut tumbuh dan berkembang modal sosial, yang berupa solidaritas, kebersamaan, optimalisasi daya lokal, nilai kerelawanan dan nilai-nilai kemausiaan. Solidaritas dan kebersamaan antara lain diwujudkan dalam bentuk adanya kesadaran senasib sepenanggungan, sehingga memiliki rasa kebersamaan yang kuat, dan adanya tanggungjawab bersama. Optimalisasi sumber daya lokal diharapkan potensi yang terdapat di lokasi KSM dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Nilai kerelawanan dan nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk saling tolong menolong sesama anggota dalam KSM, dimana kesulitan salah satu anggota dirasakan sebagai kesulitan bersama, yang kuat membantu yang lemah.

b. Melalui pendekatan kelompok, proses pemberdayaan

(empowerment) dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena akan terjadi saling asah, asuh, asih antar sesama anggota dalam kelompok. Dengan kelompok, proses pembinaan akan lebih mudah karena masing-masing anggota telah memiliki kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan maupun kesamaan domisili.

c. Kelompok Swadaya Masyarakat dapat dibina untuk mengemangkan dan melembagakan tanggungjawab renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, sarana interaksi antar anggota, mendidik untuk tertib angsuran serta upaya peningkatan usaha antar anggota.

2. Diterapkannya strategi tridaya, yang berupa :

a. Penguatan sosial, yang berupa pengorganisasian kelompok masyarakat. Penguatan sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam kelompok sasaran. Sasaran pembinaan bukanlah para individu, melainkan mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha yang berupa KSM. Melalui pembinaan KSM diharapkan nantinya masing-masing KSM mampu memberdayakan anggotanya sehingga akan terjadi pembinaan yang berkelanjutan.

b. Penguatan ekonomi, yang berupa pemberian bantuan dana yang digunakan untuk tiga jenis kegiatan yakni :

1). Pinjaman dana bergulir untuk membantu penyediaan modal kerja bagi kegiatan ekonomi kelompok miskin yang tergabung dalam KSM, dengan bunga mendekati tingkat bunga komersial untuk jangka waktu 12 – 18 bulan. Dana modal kerja bergulir ini pada dasarnya merupakan milik masyarakat yang dikelola oleh BKM dibawah pengawasan anggota masyarakat pada umumnya, dikelola dengan menggunakan rekening bank terdekat atas nama BKM. Laporan keuangan harus dilakukan secara periodek dan transparan sehingga masyarakat umum dapat ikut serta mengawasi dan mengetahui perkembangannya. Pinjaman dana bergulir dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi ekonomi.

2) Dana bantuan hibah untuk peningkatan keterampilan. Salah satu hambatan pengembangan kegiatan usaha bagi masyarakat pedesaan adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya

jiwa kewirausahaan. Untuk keperluan tersebut, disediakan dana untuk pelatihan keterampilan, magang maupun pengembangan jiwa kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Melalui kegiatan pelatihan dan magang diharapkan tercipta jaringan kerja kemitraan model bapak angkat, sehingga para peserta pelatihan akan terbantu dalam perolehan bahan baku maupun pemasaran produk yang dihasilkan. Apabila para pengangur, para pemuda putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga dapat membuka usaha ekonomi produktif diharapkan akan dapat menambah penghasilannya, sehingga kemiskinan yang ada semakin dapat dikurangi. Kegiatan pelatihan dan magang ini dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi budaya.

3). Dana bantuan hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar kelompok. Dana hibah untuk infrastruktur dapat digunakan untuk pembangunan sarana pertanian misalnya perbaikan

saluran irigasi, perbaikan dan perluasan pasar, pembangunan jalan kampung, perbaikan lingkungan dan sarana lain yang secara langsung membantu peningkatan usaha kelompok miskin. Kegiatan pembangunan infrastruktur ini secara tidak langsung memberikan pekerjaan dan penghasilan bagi warga masyarakat miskin di wilayah yang bersangkutan, sehingga taraf hidupnya dapat ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur dapat juga digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang berdimensi struktural.

3. Penguatan lingkungan, dalam bentuk kegiatan pendampingan yang intensif kepada anggota masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Kegiatan pendampingan dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal, orientasi usaha, pengelolaan usaha, dan kemitraan sehingga kelompok sasaran benar-benar mampu dan berani melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Untuk mendukung kegiatan ini dilakukan pertukaran informasi sehingga para kelompok sasaran mampu

membaca dan memanfaatkan peluang kerja

4. Adanya keberpihakan kepada kelompok keluarga miskin, dimana kelompok sasaran program P2KP diarahkan kepada keluarga Pra Sejahtera maupun Keluarga sejahtera I yang memiliki usaha maupun telah siap berusaha. Agar memudahkan pembinaan dan pendampingan, kepada mereka diarahkan untuk membentuk KSM. Bagi mereka yang memerlukan modal kerja diberikan bantuan modal secara bergilir yang dikelola dengan sistem tanggungjawab renteng. Kepada keluarga miskin yang belum memiliki usaha diberikan pelatihan keterampilan ataupun magang sehingga mereka ini memiliki kesempatan untuk dapat berusaha. Setelah mereka ini siap berusaha, kemudian membentuk KSM untuk selanjutnya diberikan bantuan modal kerja bergilir.
5. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yaitu mampu menumbuhkan usaha baru yang bersifat produktif

dengan berbasis pada usaha kelompok.

6. Penyiapan pengembangan dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Program P2KP sebagai program JPS lebih efektif dan menguntungkan dibanding Program Bantuan Pangan, IDT maupun PDM-DKE, karena :
 - a. Sasaran program P2KP bukan perseorangan melainkan kelompok swadaya masyarakat (KSM), dimana KSM dapat digunakan sebagai sarana pembinaan yang berkelanjutan.
 - b. Program P2KP bersifat komprehensif, tidak hanya memberikan bantuan modal kerja melainkan bantuan untuk pelatihan keterampilan maupun pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
 - c. Masyarakat sebagai anggota BKM sebagai pemegang

- kekuasaan tertinggi dalam mengelola program P2KP sebagai wujud demokratisasi penegelolaan program dengan berdasar pada asas transparansi dan tanggungjawab bersama.
- Program P2KP dapat difungsikan sebagai wahana pemberdayaan dalam penganggulangan kemiskinan, karena program ini menerapkan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan baik melalui pembinaan dalam internal KSM maupun pembinaan oleh BKM.
 - Adanya program pelatihan dan magang untuk meningkatkan keterampilan usaha dan pengembangan jiwa kewirausahaan serta dijalinnya hubungan kemitraan sehingga permasalahan pengadaan bahan baku dan pemasaran dapat terpecahkan.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2001. *UU No. 25 Th 2000 Tentang Propenas : Program Pembangunan Nasional tahun 2000 – 2004*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darmawan Saleh, dkk. 2000. *Kebijaksanaan : Modul Diklat Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Pusdiklat Departemen

Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Gunawan Sumadiningrat. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dan jaraing Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia.

Edy Suandi Hamid. 2000. *Indonesia Dalam Millenium Ketiga*. Yogyakarta : UII Press

Ricky Iswar, dkk. 2000. *Wawasan : Modul Diklat Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta : Pusdiklat. Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah

Tim KMW IX DIY. (2002). *Perumusan Aksi & Strategi Pendampingan Dalam rangka Keberlanjutan P2KP Tahap I dan II di Kabupaten Sieman*. (publikasi terbatas)

Tim Persiapan P2KP. 1999. *Manual Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*. Jakarta : Sekretariat P2KP Pusat.

-----, 1999. *Penjelasan Umum Proyek Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Tim Persiapan P2KP Pusat.

Biodata

Biodata

Sukidjo, lektor kepala pada FIS UNY dan lahir di Yogyakarta tgl 06 September 1950. Lulus S1 pada Jurusan ekonomi Koperasi FKIS IKIP Yogyakarta th 1974. Sejak th 1975 sebagai staf pengajar pada FKIS IKIP Yogyakarta. Lulus S2 pada Jurusan PEP di FPS IKIP Jakarta di Yogyakarta th 1987. Sejak th 1990 sebagai Tim Pengembang Pendidikan IPS Sub Bidang Ekonomi pada Pustekkom Depdiknas. Dalam th 1997, sebagai peserta program refresher di IOWA University USA yang diselenggarakan oleh proyek PGSM.